

**PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA
OLEH PARTAI POLITIK DI KOTA PADANG**
(Studi Pada Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera
dan Partai Demokrat)

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



Oleh:

RAHMI JUNIARTI
NIM/ TM: 79275/2006

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Oleh Partai
Politik Di Kota Padang (Studi Partai Golongan Karya,
Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat

Nama : Rahmi Juniarti

TM/NIM : 2006/79275

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial

Padang, Januari 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Al Rafni, M.Si

Drs. M. Fachri Adnan, M.Si

Nip. 1968802121993032001

Nip. 195810171985031002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Politik fakultas Ilmu-ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Oleh Partai Politik Di Kota Padang

(Studi Pada Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat)

Nama : Rahmi Juniarti

TM/NIM : 2006/79275

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial

Padang, Januari 2011

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dra. Al Rafni, M.si

Sekretaris : Drs. M Fachri Adnan, M.Si

Anggota : Drs. Helmi Hasan, M.Pd

Anggota : Estika, S.H

Anggota : Lince Magriasti

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim

Padang , Januari 2011

Yang menyatakan

Rahmi Juniarti

79275/2006

ABSTRAK

Rahmi Juniarti, TM/NIM : 2006/79275, Pendidikan politik Bagi Generasi Muda Oleh Partai Politik Di Kota Padang (Studi Pada Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat

Masalah penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini terindikasi banyaknya parpol melaksanakan kegiatan hanya menjelang pemilu, karena hal itu masalah penelitian ini dirumuskan bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh partai Golkar, PKS dan Demokrat kepada generasi muda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program yang dirancang oleh parpol, pelaksanaan pendidikan politik oleh parpol, dan kendala-kendala serta solusi dari parpol.

Adapun jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti sendiri yang menentukan sendiri informan penelitiannya. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan alat pengumpul data berupa: pedoman wawancara, alat perekam suara dan catatan lapangan hasil studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dirancang oleh ketiga partai (Golkar, PKS dan Demokrat) yaitu lebih diarahkan kepada sukses sosialisasi politik. Pendidikan politik yang dilaksanakan ketiga partai bervariasi, Golkar mengadakan seminar, kampanye dan pelatihan kepada kader pada waktu tertentu, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera lebih dititikberatkan kepada kegiatan harian yaitu berupa pertemuan antara pengurus partai dan masyarakat dalam rangka peningkatan nilai dan norma, sementara Partai Demokrat lebih dititik beratkan kepada pelatihan kader secara berskala dan kampanye serta menjalankan visi dan misi partai. Secara umum ketiga partai melaksanakan pendidikan politik lebih sering menjelang pemilu berupa kampanye politik. Adapun kendala yang ditemui ketiga parpol yaitu keterbatasan waktu, tingkat partisipasi generasi muda yang kurang maksimal dan masyarakat yang kurang menyadari tentang pendidikan politik. Solusi yang akan dilakukan dari ketiga parpol yaitu menambah jumlah pengurus partai politik dan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan politik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Oleh Partai Politik di Kota Padang (Studi Pada Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat)**

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Drs. Fachri adnan, M.Si, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang memberikan surat izin penelitian.
2. Ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik. Staf pengajar beserta karyawan/wati Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang memberi kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu penguji (1) Bapak Drs. Helmi Hasan, M.Pd, dan Dra. Aina membimbing penulis dalam penulisan ini.

4. Bapak Muklis Sani beserta pengurus partai Demokrat yang Telah membantu penulis dalam memperoleh informasi.
5. Bapak Irwan Ismail, S.Ag beserta pengurus PKS yang Telah membantu penulis dalam memperoleh informasi.
6. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah banyak membantu, memotivasi dan membimbing baik moril Maupun spiritual untuk penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada dosen yang membimbing dan pada teman-teman yang memberikan andilnya, memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	Vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	Viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Partai politik.....	10
2. Pendidikan politik.....	16
3. Generasi Muda.....	22
B. Kerangka Konsep.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi penelitian.....	28
C. Informan penelitian.....	28
D. Jenis, sumber data, teknik dan alat pengumpul data.....	30
E. Uji keabsahan data.....	33

F. Teknik analisis data	33
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Temuan Umum	36
B. temuan Khusus.....	43
C. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel 1 Nama Informan Penelitian dari partai politik.....	29
Tabel 2 Nama Informan penelitian dari Generasi Muda.....	29
Tabel 3 Jenis dan sumber data.....	31
Tabel 4 Program Kerja Partai Golkar.....	46
Tabel 5 Program Kerja PKS.....	49
Tabel 6 laporan kegiatan parta Demokrat.....	51

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1. Kerangka konseptual.....26
2. Gambar pelaksanaan pendidikan politik oleh generasi muda.....48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi suatu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokrasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik merupakan suatu jembatan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

Partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, partai politik hendaknya berperan sebagai penyebar program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian partai politik memainkan fungsi yang menjadi ciri khas masyarakat yang demokratis. Jadi partai politik hendaknya dapat memainkan peranannya sebagai pendorong proses komunikasi timbal balik antara rakyat dengan pemerintah.

Menurut Masad Masrul (2007) Partai politik memiliki beberapa fungsi yang mana salah satunya memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan pengenalan organisasi politik, lembaga kekuasaan dan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga tercipta kesadaran politik. Jika fungsi partai politik itu dilaksanakan dengan baik oleh partai-partai, maka tertib social akan terjamin, dengan demikian segenap lapisan dan golongan yang ada dalam masyarakat dapat membangun dan merealisasikan cita-cita mereka. Namun didalam kenyataan, partai politik yang ada gagal menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Hal demikian, terlihat dimana saat partai politik meyakinkan para pemilih dengan

menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu, pada prakteknya kampanye terbuka hanya bermodalkan hiburan yang menyebabkan kurang terdidiknya warga negara secara politik.

Menurut Sukardi Rinakit (2007) Fungsi pendidikan politik parpol belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat, justru partai politik menuai kritik, karena parpol cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit parpol ketimbang kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandang para elit parpol hanya sebuah slogan tak bermakna. Kondisi ini menuntut setiap partai politik untuk mengoreksi sejauhmana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan terus-menerus.

Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate dalam Sukardi Rinakit(2007) menilai fungsi pendidikan politik parpol saat ini sangat buruk. Dia berpendapat kualitas implementasi peran dan fungsi parpol seharusnya dimulai dari proses rekrutmen dan kaderisasi pengurus parpol. "Proses rekrutmen dan kaderisasi parpol harus dijalankan secara baik. Sehingga pengurus parpol bertanggung jawab menjalankan fungsi-fungsi parpol di antaranya fungsi pendidikan politik".

Sulastomo dalam Sukardi Rinakit (2007) bahwa partai politik bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi,

setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus-menerus, pada kenyataannya, partai politik justru memberikan contoh yang buruk.

Ada beberapa partai besar di Indonesia yang selalu mempunyai pendukung yang cukup loyal dalam setiap kali pemilu legislatif diselenggarakan. Dalam hal ini seperti partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Masing-masing partai tersebut mempunyai haluan tersendiri dan massa sendiri dan mempunyai visi dan misi yang berbeda yang pada intinya mempunyai tugas sebagai organisasi pendidikan politik bagi masyarakat. Salah satu golongan masyarakat yang menjadi tujuan pendidikan politik yaitu generasi muda. Pendidikan politik merupakan suatu usaha pengenalan organisasi politik, lembaga kekuasaan, dan pemerintahan kepada generasi muda, sehingga tercipta kesadaran politik yang berujung nantinya kepada partisipasi politik dalam pemilu.

Partai Golkar merupakan partai yang sudah lama berdiri, pada masa Orde Baru partai Golkar bukanlah sebuah partai tetapi dianggap sebagai suatu organisasi massa. Partai GOLKAR bermula dengan berdirinya Sekber GOLKAR di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Program pendidikan politik yang pernah dilakukan oleh Partai Golkar yaitu memberikan bimbingan dan bantuan serta pendidikan politik bagi rakyat sekaligus

menggerakkan ekonomi rakyat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa Azis Syamsuddin dalam Horizon (2007)

Partai Keadilan Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan PKS, sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK). Partai keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik berbasis Islam di Indonesia, PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun hijriah) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (atau 26 Rabi'ul Awwal 1419 H). PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Sebagai salah partai Islam terbesar di Indonesia PKS mempunyai massa yang identik dengan agama islam yang kuat.

Salah satu program pendidikan politik yang pernah dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menurut Gunawan (2007) adalah menyiapkan Koordinator RW/RT untuk memberikan Pendidikan Politik pada rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan kader yang bisa memberikan pendidikan politik pada rakyat tentang Pilkada. Dalam hal ini PKS sebagai partai politik, mempunyai kewajiban untuk ikut memberikan penyadaran politik tersebut melalui tiap koordinator RW dan RT yang tersebar di setiap kelurahan.

Partai Demokrat merupakan partai politik yang masih baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Keikutsertaan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif

pertama kali yaitu tahun 2004 dan kesempatan kedua yaitu pileg tahun 2009 yang lalu. Menurut Anas Urbaningrum, (koran seputar indonesia, 2010) menjelaskan bahwa bentuk program pendidikan politik yang dilakukan partai Demokrat yaitu membuat iklan media massa yang menjelaskan mengenai pendidikan politik, selain itu para kandidat partai Demokrat harus intens mendekati dan turun ke bawah yang bertujuan memberikan pendidikan politik.

Salehudin Awal dalam Ahdiat (2009) berpendapat bahwa program-program pendidikan politik yang pernah dilakukan oleh partai politik belum mencapai pada level yang diharapkan yakni, terbangunnya wawasan dan praktek politik yang rasional dan beradab pada sebagian besar masyarakat kita. Sinyalemen tersebut bisa dicermati pada satu aspek dalam politik yaitu memilih calon legislatif ataupun eksekutif. Dalam berbagai jajak pendapat terlihat bahwa preferensi orang memilih seorang kandidat tidak terlepas dari faktor-faktor seperti, kesukuan atau kedaerahan, bentuk fisik (cantik, tampan), memberikan fasilitas (uang dan atau fasilitas lain), sekeyakinan agama, sejarah masa lalu, iklan dan seterusnya.

Masyarakat memilih yang didasarkan pada visi-misi atau flatform jumlahnya masih sedikit. Padahal kebutuhan bangsa saat ini adalah lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang mempunyai kualitas yang baik. Pemipmpin-pemimpin bangsa seperti itu hanya bisa lahir dari masyarakat politik yang rasional dan cerdas yang menjatuhkan pilihan-pilihan politiknya pada kandidat-kandidat yang memang diakui memiliki SDM secara politik.

Dalam hal ini partai Golkar, PKS dan Demokrat sebagai partai yang cukup besar di Indonesia dituntut untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Di kota Padang sendiri pengikut Golkar, PKS dan Demokrat cukup banyak. Hal ini terbukti dengan keantusiasan saat kampanye pemilu legislatif 2009 berlangsung dan pada hasil pemilu 2009 partai-partai tersebut berhasil mendapat suara yang cukup banyak, sehingga sangat menarik untuk diteliti, **“Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Oleh Partai Golongan karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat di Kota Padang”** Mengingat generasi muda sebagai penerus bangsa dan sebagai estafet kekuasaan dimasa yang akan datang, diharapkan mempunyai kesadaran politik yang tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan seperti diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Program pendidikan politik yang dirancang oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat untuk generasi muda di Kota Padang
2. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk generasi muda di kota Padang
3. Kendala dan Solusi yang dilakukan oleh partai GOLKAR, PKS dan DEMOKRAT dalam pelaksanaan pendidikan politik.

C. Pembatasan Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan yang penulis angkat, banyak permasalahan yang perlu dibahas, dikupas dan dikaji lebih lanjut, namun karena keterbatasan dari penulis baik dari segi tenaga dan segi waktu yang terseedia, serta untuk mempertajam pembahasan terhadap hal-hal pokok yang akan dibahas nantinya, dengan maksud agar pembahasannya tidak meluas dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka permasalahan penelitian adalah bagaimana program dan pelaksanaan pendidikan politik yang dirancang oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk generasi muda di kota Padang, dan kendala serta solusi yang ditemui oleh partai dalam pelaksanaan pendidikan politik.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah program pendidikan politik yang dirancang oleh partai Golkar, PKS dan Demokrat untuk generasi muda di Kota Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik dilakukan oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk generasi muda di kota Padang?
3. Bagaimana kendala dan Solusi yang dilakukan oleh partai Golongan Karya, Partai keadilan Sejahtera dan Demokrat dalam pelaksanaan pendidikan politik?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui program pendidikan politik yang dirancang oleh Partai Golkar, PKS dan Demokrat untuk generasi muda dikota Padang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk generasi muda di kota Padang
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan oleh Partai Golongan karya, partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat dalam pelaksanaan pendidikan politik.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul Pendidikan Politik Bagi Generasi muda oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) politik di kota Padang

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pembaca dalam memahami ilmu politik khususnya tentang pendidikan politik dan kepartaian.

2. Secara praktis yaitu :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi generasi muda yang ikut serta berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan Pemilu.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, partai politik dan LSM agar senantiasa memberikan pendidikan politik kepada pemilih terutama pemilih pemula

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Partai Politik, Tujuan dan Fungsi Partai Politik

a. Pengertian partai Politik

Partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan baik secara social, ekonomi, moril maupun materil. Cara mengemukakan keinginan rakyat melalui partai politik mengandung pengertian adanya demokrasi. Adapun pengertian partai politik menurut para ahli berbeda-beda. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2003:831) partai politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Sementara menurut Carl J.Friedrich dalam Miriam Budiardjo (1989:61) :

“Partai politik adalah suatu kelompok manusia yang diorganisasikan secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil”. (*A political, party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*)

Partai politik menurut Maurice Duverger dalam Pihlipus, dkk (2004: 121), yaitu sekelompok manusia yang mempunyai doktrin yang sama. Selanjutnya menurut Sigmund Neumann dalam (Rochajat Harun, dkk, 2006: 158), Partai politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Sementara menurut P.K.

Poerwantana (1994: 6) partai politik adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setuju (terutama dibidang politik)

Disamping itu, setiap partai politik mempunyai ideologi yang mendasari partai politik tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Subakti (1992:116) bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang teroganisir secara rapi dan stabil yang persatukan dan dimoyivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun.

Mariam Budiardjo (1989:160), menyatakan “bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terkelola yang anggota-angotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama”. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum. Kemudian menurut Soltau dalam Rafael Raga Maram (2001:85) partai politik adalah suatu kelompok warganegara yang kurang lebih teroganisir, yang bertindak sebagai suatu unit politik dan yang berdasarkan penggunaan kekuatan voting, mereka bermaksud mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan-kebijakan umum mereka. Sedangkan menurut undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2008

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keuntuhan Negara kesatuan reepublik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945”

Dengan melihat beberapa pengertian Partai politik dari para tokoh atau para ahli memang berbeda-beda akan tetapi isi dan makna dari pengertian tersebut menunjukkan suatu kesimpulan yang sama, bahwa partai politik adalah suatu wadah yang mampu menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini mereka yang tidak sepeham dengan orang-orang yang telah duduk di Dewan, maka dengan partai politik mereka dapat menggantikan orang tersebut. Dengan kata lain bahwa partai politik merupakan alat politik untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut kekuasaan politik.

b. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Menurut Philipus (2004:123) tujuan partai politik yang demokratis itu ialah:

“a) Berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik (output pada umumnya). b) Berusaha melakukan pengawasan maksudnya bukan hanya pengawasan, tetapi juga perlu oposisi terhadap tindakan, kelakuan, dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama jika mayoritas pemerintahan tidak berada dipihaknya). c) Berperan sebagai pemandu (*Steamlining*), dalam hal ini parpol berperan memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga parpol berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat”.
Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.2 tahun 2008 pada Bab V

pasal 10 tentang partai politik tujuan dari partai politik ialah

(1) Tujuan umum partai politik

- a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD RI tahun 1945.
- b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan RI, dan
- d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus partai politik

- a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
- c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

(3) Tujuan partai politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Jadi tujuan dari partai politik adalah untuk meningkatkan, mewujudkan, dan membangun etika dan budaya politik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperjuangkan cita-cita partai politik.

Menurut Sigmund Neumann dalam (Macridis, 1988), fungsi partai politik ada empat yaitu: (1) fungsi agregasi. Partai menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang kacau. Sering kali masyarakat merasakan dampak negatif suatu kebijakan pemerintah, (2) fungsi edukasi. Partai mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai. Tujuannya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam politik sedemikian sehingga partai mendapat dukungan masyarakat. (3) fungsi artikulasi. Partai merumuskan dan menyuarakan (mengartikulasikan) berbagai kepentingan

masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan umum (public policy). Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kader suatu partai, karena fungsi ini mengharuskan partai terjun ke masyarakat dalam segala tingkatan dan lapisan. (4) fungsi rekrutmen. Ini berarti partai melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik dalam arti mendudukan kader partai ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, maupun rekrutmen partai dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi kader baru ke dalam partai. Rekrutmen politik dilakukan dengan jalan mengikuti pemilihan umum dalam segala tahapannya hingga proses pembentukan kekuasaan,

Menurut Roy C Macridis (1988) fungsi partai sebagai berikut: (a) Representatif (perwakilan), (b) Konvensi dan Agregasi, (c) Integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), (d) Persuasi, (e) Represi, (f) Rekrutmen, (g) Pemilihan pemimpin, (h) Pertimbangan-pertimbangan, (i) Perumusan kebijakan, serta (j) Kontrol terhadap pemerintah.

Selain itu, Ramlan Surbakti (1999: 116-121) fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi tersebut, partai juga melaksanakan sejumlah fungsi lain yaitu

- 1) Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, informal, dan non formal.

- 2) Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pada pemerinyahan pada khususnya.
- 3) Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin pemerintah. Kegiatan yang dimaksud antara lain membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atau pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.
- 4) Pemadu kepentingan ialah kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan pertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan
- 5) Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.
- 6) Pengendalian konflik ialah partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
- 7) Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pada Bab V dalam pasal 11 ayat (1) mengatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana:

“a). Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, b). Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, c). Penyerap, pengimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara, d). Partisipasi politik warga Negara Indonesia, dan e). Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme

demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender”.

Dengan melihat fungsi partai politik yang dikemukakan oleh para tokoh atau para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik yaitu melakukan pendidikan politik bagi anggotanya dengan cara memberikan pengajaran atau program dari partai agar masyarakat mengerti dan mengetahui apa tujuan partai itu dan mau dibawa kemana rakyat oleh partai politik, sehingga rakyat tidak sangsi atas keabsahan partai politik itu.

2. Pendidikan Politik dan Fungsi Pendidikan politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan sarana vital dalam pembentukan warganegara atau individu-individu untuk mendapatkan informasi, wawasan serta memahami sistem politik yang berimplikasi pada persepsi mengenai politik dan peka terhadap gejala-gejala politik yang terjadi disekitarnya. Warganegara diharapkan memiliki keterampilan politik sehingga memiliki sikap yang kritis dan mampu mengambil alternatif pemecahan masalah dari masalah-masalah politik yang ada disekitarnya. Dengan demikian pendidikan politik memberikan landasan yang kuat bagi proses demokratisasi. Menurut Gabriel Almond dalam (Ryas Rasyid 1999:72) bahwa

“Pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan orang yang dimasa kanak-kanaknya belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya.....”

Menurut R. Hayer dalam (Kartini Kartono 1989:14) pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia partisipan yang bertanggung jawab dalam politik

Pendidikan politik adalah cara yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk mentransfer budaya politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi dan melalui informal antara lain melalui panataran-panataran dan juga termasuk melalui media masa. Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan menetapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan. Dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, adil, dinamis, efisien dan efektif. Sebenarnya pendidikan politik itu secara ilmiah telah berjalan dan akan tetap berlangsung terus melalui berbagai interaksi sosial masyarakat yang dikenal sebagai proses penghayatan nilai, disinilah manusia harus belajar mendalami dan melatih diri, serta meyakini bahwa nilai-nilai itu adalah nilai yang terbaik dan pentingnya sesuai dengan kondisi yang objektif, alam fikir dan perasaan serta menurut hati nuraninya, maupun penalarannya benar-benar merupakan bagian hidup. Jadi penghayatan nilai itu sendiri haruslah diarahkan kepada semakin mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara khususnya kehidupan politik.

Menurut Brownhill dalam Ahdiat (2007) pendidikan politik adalah sebagai suatu cara untuk memperthankan keadaan yang tetap stabil pada suatu saat tertentu, serta diharapkan dapat memberikan dasar bagi proses demokrasi yang lebih maju. Dengan demikian, pendidikan politik erat kaitannya dengan mempertahankan keadaan agar tetap stabil pada periode kekuasaan tertentu.

Ahdiat (2009) menjelaskan bahwa

“Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik”.

Menurut Kartini Kartono (2009:64): “Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/ moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik “pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Pendidikan politik menurut Paul Sinlaeloe (2008) adalah bukan proses sepihak ketika partai politik memobilisasi dan memanipulasi warga/masyarakat untuk menerima nilai, norma, maupun simbol yang dianggapnya ideal dan baik, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik totaliter.

Menurut Alfian (dalam Endang Sumantri, 2008) Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”.

Pendidikan politik menurut Instruksi Presiden No. 12 tahun 1982 dalam (Endang Sumantri) tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda adalah sebagai berikut: “Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien”. Dengan demikian pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*national character building*).

Dari pengertian pendidikan politik yang dikemukakan oleh para tokoh maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk mentransfer budaya politik dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memperthankan keadaan yang tetap stabil pada suatu saat tertentu, serta diharapkan dapat memberikan dasar bagi proses demokrasi yang lebih maju.

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik dapat ditempuh dua metode yaitu dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, yang terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakat.

Dalam rangka upaya untuk mengembangkan pendidikan yang membentuk watak peradaban bangsa serta menjadi warganegara adalah bagian penting dari tujuan pendidikan politik. Menurut Wahap (Bambang 2008:7) “ pendidikan politik bertujuan membentuk warganegara yang baik, yaitu warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu dan warganegara. Dengan demikian, terwujudnya warganegara yang baik (*good citizen*) yaitu warganegara yang melek politik. Memiliki kesadaran politik, dan berpartisipasi kehidupan politik merupakan tujuan dari pendidikan politik.

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 31 ayat (1) dan (2) tujuan pendidikan politik:

- (1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

fungsi Pendidikan politik menurut Ahdiat (2009) adalah menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan social dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk menggeluti berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk partisipasi politiknya, sehingga mereka paham terhadap ideology politik yang dianutnya untuk kemudian membelanya dan dengannya mereka wujudkan cita-cita diri dan bangsanya. Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideology politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini.

Jadi fungsi pendidikan politik adalah untuk membentuk dan menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan social dalam bentuk atensi dan partisipasi, sehingga mereka paham terhadap ideology politik yang dianutnya dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

3. Generasi Muda

Menurut pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda 1982. generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan insan bagi pembangunan. Generasi muda adalah golongan usia yang berusia muda. Dilihat dari segi idiologis politis, generasi muda adalah calon pengganti generasi terdahulu yang berusia 18 sampai dengan 30 tahun, bahkan kadang-kadang sampai 40 tahun. Lembaga ruang lingkup tempat beradanya generasi muda adalah siswa yang berusia 16 sampai dengan 17 tahun, mahasiswa yang berusia 18 sampai 25 tahun dan diluar sekolah dan perguruan tinggi 18 sampai dengan 30 tahun (Nurhayati, 1999:15).

Pemuda atau generasi muda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO menyebut sebagai "young people" dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut "adolesceneae" atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun

sebagai kelompok pemuda. pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural Yagialdiano (2008)

Menurut Draft RUU Kepemudaan (<http://one.indoskripsi.com>). generasi muda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Oleh karenanya pemuda selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat secara umum. Dalam makna yang positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharuan

generasi muda merupakan sasaran empuk bagi para partai politik yang ada. Generasi muda menjadi ladang emas suara bagi keseluruhan partai politik. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini tentu akan bisa dirasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti, maka dalam hal ini partai politik mempunyai kewajiban memberikan pendidikan politik kepada generasi muda.

Khusus bagi generasi muda, tujuan pendidikan politik di Indonesia menurut Kartini Kartono (2009:70) adalah:

1. Membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik, sadar akan hak dan kewajiban politiknya selaku warganegara, disamping sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang terus-menerus membangun.
2. Membangun orang muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam seluruh sifat watak atau karakteristik kepribadian Indonesia (tidak lupa jati dirinya, dan tidak mengalami proses alienasi)

Asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda masih berasaskan pada asas-asas yang tercantum dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 adalah sebagai berikut:

1) Asas umum

Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda dilandaskan kepada asas-asas yang sesuai dengan keadaan serta sifat bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, yang dipadukan dengan dinamika perkembangan kehidupan nasional dan kemajuan yang telah dicapai sehingga sasaran yang dikehendaki dengan pendidikan politik ini akan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna serta dimanfaatkan secara tepat guna oleh masyarakat dan diwujudkan dalam tingkat partisipasi yang sebesar-besarnya.

2) Asas Demokrasi

Penyampaian bahan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui jalan mendidik, mengajak, menampung, serta menyalurkan gagasan yang berkembang. Ia harus berciri demokrasi budaya Pancasila atas dasar komunikasi timbal-balik yang penuh tanggung jawab dan musyawarah untuk mufakat dalam perbedaan pendapat yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya sebagai bangsa.

3) Asas Keterpaduan

Pendidikan politik bagi generasi muda harus menunjang terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin stabilitas serta kepemimpinan nasional. Dalam dinamikanya, pendidikan politik harus terpadu, selaras, serasi, dan seimbang dengan strategi nasional sehingga akan dapat tercapai suatu tata kehidupan nasional yang semakin maju dan bersatu.

4) Asas Manfaat

Pendidikan politik bagi generasi muda diselenggarakan sedemikian rupa, baik dalam bahan mau pun caranya sehingga hasil yang dicapai dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Ia harus dapat meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, mau pun bangsa dan pengembangan pribadi.

5) Asas Bertahap, Berjenjang, dan Berkelanjutan

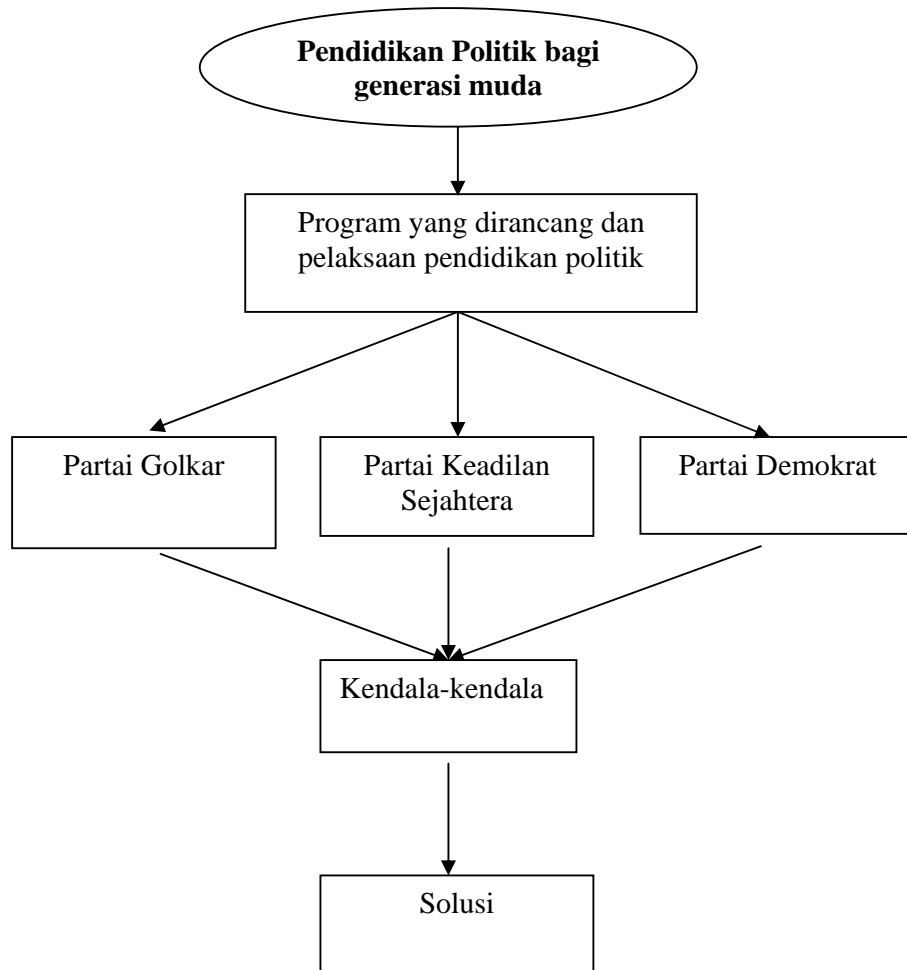
penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui penahanan secara berjenjang, baik dari segi pertumbuhan alamiah manusia dari usia bawah mau pun dari segi pertumbuhan kehidupan masyarakat melalui organisasi yang ada atau golongan pendidikan, mulai dari pimpinan sampai kepada yang lebih besar di bawahnya. Ia semata-mata harus didasarkan atas kemampuan obyektif manusia. Di samping itu, pendidikan politik harus dilaksanakan secara terus-menerus dan harmoni, sebagai suatu proses pematangan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang makin maju dan berkembang.

6) Asas Aman

Pendidikan politik bagi generasi muda menunjang kehidupan nasional dengan semakin tingginya kesadaran berbangsa dan bernegara dan terpeliharanya laju pembangunan nasional. Sebagai kondisi, ia harus dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan manusia Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan terhadap setiap kendala dan tantangan yang dihadapi. Ia harus aman dari berbagai pengaruh negatif yang berasal dari dalam dan luar negeri berlanjut sepanjang hayat.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa

1. Program yang dirancang oleh parpol

Program yang dirancang dari ketiga parpol yaitu partai Golongan karya program yang dirancang sukses konsolidasi dan sukses sosialisasi, lain hal pada Partai Keadilan sejahtera program yang dirancang lebih mengarah kepada strategi politik dan sosialisasi politik dan Partai Demokrat program yang dirancang lebih mengarah sukses kaderisasi dan sukses sosialisasi politik.

2. Pelaksanaan pendidikan politik yang telah dilakukan oleh parpol

Pelaksanaan pendidikan politik yang telah dilakukan oleh partai Golkar yaitu mengadakan seminar politik dengan generasi muda bertujuan memberikan pemahaman tentang program parpol kepada generasi muda dan saat menjelang pemilu partai mengadakan kampanye. Lain halnya pada Partai Keadilan Sejahtera, pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai ini hanya di fokuskan saja pada kegiatan-kegiatan agama, sehingga partai ini banyak pengikutnya dikalangan masyarakat. Sedangkan Partai Demokrat bentuk pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan ialah lebih ditekankan kepada pelatihan kader dan kampanye.

3. Kendala dan solusi yang dilakukan oleh parpoll dalam pelaksanaan pendidikan politik

a) Kendala-kendala yang ditemui oleh parpol

Kendala-kendala yang ditemui oleh parpol (GOLKAR, PKS, dan DEMOKRAT) yaitu belum ada aturan-aturan mengenai petunjuk pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari anggota partai dan masyarakat luas terhadap arti pentingnya pendidikan politik, tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas atas pelaksanaan pendidikan politik oleh partai Golkar, PKS, dan Demokrat, keterbatasan jumlah pengurus partai politik dan biaya yang dialokasikan untuk pendidikan politik.

b) Solusi yang dilakukan oleh parpol

Solusi dari kendala-kendala yang terjadi dalam pendidikan politik oleh partai Golkar, PKS, dan Demokrat yaitu parpol segera membuat peraturan tentang petunjuk pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik, partai parpol harus lebih aktif didalam membuka pemahaman dan kesadaran masyarakat didalam kehidupan berpolitik, parpol didalam membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan pendidikan politik harus dibuat secara terstruktur dan terperinci serta laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat luas, menambah jumlah pengurus partai politik dan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan politik.

1. Mengadakan pendidikan politik bagi kalangan mahasiswa berpotensi untuk mengembangkan keterampilan politik dan karakter kepemimpinan.
2. Mengembangkan wawasan dan kemampuan politik praktis melalui praktik kerja politik magang politik.
3. Mengadakan diskusi, seminar, dan pelatihan sebagai bagian dari kajian yang diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pemecahan persoalan sosio-politik.
4. Mengembangkan kerjasama dengan kekuatan-kekuatan civil society di Indonesia untuk membangun kesadaran politik dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi.
5. Mengembangkan jaringan informasi sosio-politik dengan berbagai kalangan pemerhati maupun pelaku politik.
6. Mengembangkan kerjasama dengan media massa untuk mengembangkan isu-isu demokrasi.
7. Menerbitkan suatu buletin hasil kajian Sekolah Politik Kerakyatan tentang isu-isu sosial dan politik.
8. Mengadakan perpustakaan politik Indonesia yang dapat diakses umum.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, Penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan proses Pendidikan Politik. Agar lebih mudah untuk menjalankan fungsi Partai Politik dalam hal ini proses Pendidikan Politik, maka:

- a. Parpol (GOLKAR, PKS, dan DEMOKRAT) harus segera melakukan restrukturisasi semua jenjang kepengurusan (Kecamatan dan Desa/Kelurahan)
- b. Segera lakukan koordinasi pembenahan kepengurusan organisasi sayap (AMPG dan KPPG) sampai tingkat basis
- c. Segera mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus sesuai bidangnya, baik pada tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, Kelurahan/Desa.

- d. Parpol sebaiknya memberikan perhatian kepada masyarakat, tidak pada saat pemilu saja tetapi sebaiknya pendidikan politik harus dilakukan terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hafied Cangara.2009. *komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rochajat Harun,dkk. 2006. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartini Kartono.2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju
- Lexi Moleong.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Miriam Budiardjo.2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Miles dan Huberman-AM.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pers.
- Nurhayati. 2000. *Peranan Pendidikan Politik Bagi generasi Muda Menuju Demokratisasi politik*. Skripsi. Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, IKIP. 75 Hal (tidak dipublikasikan)
- Philipus. 2004. *Sosiologi dan politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- P.K. Poerwantana. 1994. *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rafael Raga Maran. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ramlan Subakti.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Widiararana Indonesia
- Ryas Rasyid.1999. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sogiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta